

SKRIPSI



TINJAUAN YURIDIS TENTANG DELIK PENIPUAN (Studi Kasus Putusan No. 556/Pid.B/2012/PN.Mks)

Oleh

KIKY WAHYUNI

B 111 09 402

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

Halaman Judul

TINJAUAN YURIDIS TENTANG DELIK PENIPUAN

(Studi Kasus Putusan No. 556/Pid.B/2012/PN.Mks)

Oleh :

KIKY WAHYUNI

B 111 09 402

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi

Sarjana dalam Program Studi Ilmu Hukum

Pada

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2013

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TENTANG DELIK PENIPUAN

(Studi Kasus Putusan No.556/Pid.B/2012/PN.Mks)

Disusun dan diajukan oleh

KIKY WAHYUNI

B 111 09 402

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi program sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Rabu 20 Februari 2013
Dan Dinyatakan Diterima

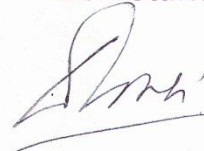
Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
NIP. 19590317 198703 1 002

Sekretaris



Dara Indrawati, S.H., M.H.
NIP. 19800710 200604 2 001

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Mahasiswa :

Nama : Kiky Wahyuni

NIM : B 111 09 402

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : "Tinjauan Yuridis Tentang Delik Penipuan (Studi Kasus Putusan No. 556/Pid.B/2012/PN/Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Januari 2013

Disetujui Oleh

Pembimbing I,



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.
NIP. 19590317198031002

Pembimbing II,



Dara Indrawati, S.H., M.H.
NIP. 198007102006041001

PERSETUJUAN MENEMPUIH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : KIKY WAHYUNI

No. Pokok : B111 09 402

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis tentang Delik Penipuan (Studi Kasus
Putusan No.556/Pid.B/2012/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2013



a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.

NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

Kiky Wahyuni B11109402 Tinjauan Yuridis Tentang Delik Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor: 556/Pid.B/2012/PN/Mks) dibawah bimbingan bapak **Muhadar** sebagai pembimbing I dan ibu **Dara Indrawati** sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana materil oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku delik penipuan dalam perkara putusan No. 556/Pid.B/2012/PN/Mks dan untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku delik penipuan dalam perkara putusan No. 556/Pid.B/2012/PN/Mks.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar. Penulis memperoleh data dengan menganalisis kasus putusan dan dengan mengambil data dari kepustakaan yang relevan yaitu literatur, buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut, serta mengambil data secara langsung dari sebuah putusan pengadilan yang berupa wawancara kepada hakim yang berkaitan dalam menangani kasus penipuan.

Hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa (1) Penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku dalam perkara putusan No. 556/Pid.B/2012/PN/Mks, oleh Jaksa Penuntut Umum terdakwa didakwa dengan menggunakan dakwaan alternatif yaitu pertama Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP, dan surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi syarat formal dan materil surat dakwaan sebagai dimaksud Pasal 143 ayat (2) KUHP. Dalam tuntutananya, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP, berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa, maka penerapan hukum pidana materil pada perkara ini yakni Pasal 378 KUHP telah sesuai dan tepat. (2) Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam perkara putusan No. 556/Pid.B/2012/PN/Mks, oleh Majelis Hakim terdakwa dipidana dengan pidana penjara 1 (Satu) tahun karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan pada Pasal 378 KUHP. Pertimbangan Hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara ini telah sesuai dimana hakim telah mempertimbangkan baik dari pertimbangan yuridis, fakta-fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang ada, keyakinan Hakim serta hal-hal lain yang mendukung serta sanksi pidana yang dijatuhkan masih sangat ringan, tidak cukup untuk menimbulkan efek jera yang memberikan rasa takut bagi terpidana pada khususnya, dan khalayak ramai pada umumnya sebagaimana fungsi pidana pada mestinya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta ridho-Nya kepada penulis, sehingga penulis senantiasa diberikan kemudahan, kesabaran dan keihklasan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tentang Delik Penipuan (Studi Kasus Putusan No. 556/Pid.B/1012/PN.Mks.)”**

Skripsi ini disajikan dengan pembahasan yang cukup sederhana, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini belumlah sempurna, adapun kekurangan dan ketidak sempurnaannya karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, namun usaha semaksimal mungkin telah dilakukan guna menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Untuk mencapai gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.

Mengawali ucapan terima kasih ini perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada orang tua penulis Ayahanda **KOMPOL Maupe Bagus, S.H** dan Ibunda **Hj. Nuraeni** atas segala pengorbanan, kasih sayang dan jerih payahnya selama membesarkan dan mendidik, serta doanya demi keberhasilan penulis. Terima kasih juga kepada kakandaku tercinta **Briptu Zulkarnain Bagus Saputra** dan seluruh keluarga besar atas segala bantuan dan dukungannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terselesainya penulisan skripsi ini, tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah penulis dalam kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih tak terhingga kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Idrus A. Paturusi, Sp.B., SP.BO**, beserta Pembantu Rektor lainnya.
2. **Prof. Dr. Aswanto, S.H.,M.S, DFM.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta para Pembantu Dekan.
3. Bapak **Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.Si**, selaku Pembimbing I dan Ibu **Dara Indrawati, S.H.,M.H** selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan guna penyusunan skripsi ini.
4. Bapak **H. M. Imran Arief, S.H.,M.Si**, Bapak **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H**, dan Ibu **Hj. Nur Azisa, S.H.,M.H**, selaku penguji yang telah memberikan masukan beserta saran-sarannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu Penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Ketua Pengadilan Negeri Makassar, staf Pengadilan Negeri Makassar Bapak **Mustari, S.H**, Bapak **Jan Manoppo, S.H.,M.H** selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan Bapak **Greafik Loserte, T.K., S.H** selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Makassar, serta para narasumber lain yang telah banyak membantu penulis selama melakukan penelitian skripsi ini.
7. Kepada seluruh teman-teman BSDK. Terutama buat kanda **Yefta Gracian D'Mayor Kardiono Sastrawardaja, S.H** yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman terbaik yang selalu membantu serta setia dalam keadaan suka dan duka penulis, **Dewi Anggia, Ariza Sufraningrum Fauzi, Khinanty Gaby Pradipta, Nalia Mutiara Dini, Adis Nevi Y, A. Winarni** dan **Musdalifa Ayu**, penulis sangat berterima kasih atas semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Special thanks to bilo **Syahril Said, S.H** yang telah membantu serta selalu memberi semangat, perhatian dan telah menjadi motivator buat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman KKN Reguler Gelombang 82 Kel. Fakkie, Kec. Tiroang Kab. Pinrang **Astri, Eveline, Isabela, Rika, Yari, Indra, Wawan, Zwing, Musawir, Frans** dan teman-teman Kel. Tiroang **Ryan Ugahari, A. Aditya Chandra H**, penulis sangat mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada seluruh teman-teman Doktrin angkatan 2009 yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan motivasinya.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan dan masukan yang sifatnya membangun guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

**Wabillahi Taufiq
Walhidayah
Wassalamu Alaikum Wr.
Wb.**

Makassar, Februari
2013

Kiky Wahyuni

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 7
A. Pengertian Delik dan Unsur-Unsurnya	7
1. Pengertian Delik	7
2. Unsur-Unsur Delik	9
B. Pengertian Delik Penipuan dan Unsur-Unsurnya	11
1. Pengertian Delik Penipuan	11
2. Unsur-Unsur Penipuan	21
C. Pidana dan Pemidanaan	24
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan	24
2. Jenis-jenis Pidana	28
3. Teori Tujuan Pemidanaan	37
D. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana	41
 BAB III METODE PENELITIAN	 44
A. Lokasi Penelitian	44
B. Jenis dan Sumber Data	44
C. Teknik Pengumpulan Data	45

D. Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Penerapan Hukum Pidana Materil oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku delik penipuan pada Putusan No. 556/Pid.B/2012/PN.Mks	47
1. Posisi Kasus	47
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	49
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	52
4. Amar Putusan	52
5. Analisa Penulis	53
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku delik penipuan pada Putusan No. 556/Pid.B/2011/PN.Mks	60
1. Pertimbangan Hukum Hakim	60
2. Analisis Penulis	70
BAB V PENUTUP	72
1. Kesimpulan	72
2. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum sebagai konfigurasi peradaban manusia berjalan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sebagai komunitas dimana manusia tumbuh dan berkembang pula. Namun belakangan ini, terjadi berbagai distorsi perubahan dalam masyarakat Indonesia yang kemudian dikenal sebagai krisis moral. Bertambahnya angka pengangguran serta kejahatan menjadi cerminan terhadap dampak fenomena ini. Meningkatnya angka pengangguran memberikan pengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemudian dengan tingkat kesejahteraan yang rendah, sebagian masyarakat lebih cenderung tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Karena dengan tingginya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk mempertahankan hidup, sebagian masyarakat akhirnya memilih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku.

Kejahatan sebagai suatu fenomena yang kompleks harus dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Hal ini dibuktikan dalam keseharian, kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Perkembangan teknologi informasi, pengetahuan, bahkan perkembangan hukum, ikut pula

berimbas kepada perkembangan kejahatan. Sederhananya, peraturan perundang-undangan yang semakin banyak dan rumit seolah-olah memaksa pelaku kejahatan untuk semakin kreatif dan inovatif dalam melaksanakan kegiatan kejahatannya.

Salah satu bentuk kejahatan yang masih sangat marak terjadi di masyarakat yaitu penipuan. Bagi para oknum, tindak pidana penipuan tidaklah begitu sulit untuk dilakukan. Penipuan bisa terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain, baik melalui serangkaian kata bohong ataupun fiktif. Sekarang ini banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan, bahkan telah berevolusi secara apik dengan berbagai macam bentuk. Perkembangan ini menunjukkan semakin tingginya tingkat intelektualitas dari pelaku kejahatan penipuan yang semakin kompleks.

Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan zaman. Padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri pada Pasal 378 menegaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan penipuan diancam dengan sanksi pidana. Walaupun demikian masih dirasa kurang efektif dalam penegakan terhadap pelanggarannya, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu

perbuatan di dalam suatu undang-undang, namun dibutuhkan juga aparat hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Secara merata berdasarkan pantauan Penulis melalui berbagai media, tindak pidana penipuan seolah-olah secara sporadis telah menyentuh hampir seluruh daerah di Indonesia, baik itu kota besar, kota kecil, kabupaten maupun desa-desa. Kota Makassar di Sulawesi Selatan tak luput menjadi salah-satu daerah yang masih kerap terjadi tindak pidana penipuan. Adapun contoh kasus terkait dengan tindak pidana penipuan sebagaimana yang hendak diteliti, terjadinya tindak pidana penipuan pada suatu lingkup masyarakat di Kota Makassar. Tindak penipuan yang dilakukan oleh pelaku ini merupakan suatu tindak pidana penipuan yang pada kasus ini, modus pelaku yakni dengan meminta diberi pinjaman barang berupa barang-barang dagangan milik korban untuk selanjutnya barang dagangan tersebut akan dijual sendiri oleh pelaku bertempat di kios atau warung milik pelaku. Berdasarkan permintaan dari pelaku, maka korban kemudian memberikan beberapa barang dagangan miliknya tersebut kepada pelaku dengan harapan bahwa seluruh barang dagangan milik korban tersebut akan dilunasi pembayarannya paling lambat sepuluh hari sebagaimana perkataan dari pelaku bahwa pelaku akan melunasi pembayaran atas seluruh barang dagangannya tersebut paling lambat sepuluh hari sejak pelaku mengambil

barang dagangan tersebut dari korban. Seiring berjalannya waktu, korban akhirnya mengetahui bahwa si pelaku sejatinya tidak memiliki toko ataupun kios atau setidaknya-tidaknya suatu tempat dimana pelaku dapat menjual barang-barang dagangan yang dipinjamkan kepada pelaku, sedangkan barang-barang dagangan milik korban telah dijual oleh pelaku ke pihak lain dimana hasil dari penjualan barang-barang tersebut telah dinikmati sendiri oleh pelaku. Akibat dari perbuatan pelaku, mengakibatkan korban mengalami kerugian yang cukup besar.

Hal inilah yang membuat penulis ingin menelusuri lebih dalam tentang bagaimanakah penerapan hukum pidana materil oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana penipuan serta apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara mengenai tindak pidana penipuan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Tinjauan Yuridis Tentang Delik Penipuan (Studi Kasus Putusan No. 556/Pid.B/2012/PN.Mks).”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan Hukum Pidana Materil oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku delik penipuan pada Putusan No. 556/Pid.B/2012/PN.Mks?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku delik penipuan pada Putusan No. 556/Pid.B/2012/PN.Mks?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan Hukum Pidana Materil oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku delik penipuan pada Putusan No. 556/Pid.B/2012/PN.Mks.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku delik penipuan pada Putusan No. 556/Pid.B/2012/PN.Mks.

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk pembahasan mengenai delik penipuan dan dapat dijadikan sebagai referensi oleh mahasiswa terhadap penulisan-penulisan yang terkait dengan delik penipuan selanjutnya.

2. Sebagai penelitian yang dapat berwawasan ilmiah. Selain itu, diharapkan juga dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi almamater kami, yaitu Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Delik dan Unsur-Unsurnya

1. Pengertian Delik

Dalam hukum pidana delik dikenal dalam beberapa istilah seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana ataupun tindak pidana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan yakni, “Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.

Menurut Van der Hoeven (Laden Marpaung, 2005 : 7), rumusan tersebut tidak tepat karena yang dapat dihukum bukan perbuatannya tetapi manusianya.

Selain itu menurut kamus hukum Ilham Gunawan (2002 : 75) bahwa :

“Delik adalah perbuatan yang melanggar undang-undang pidana dan karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang-orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”

Istilah delik (tindak pidana) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *WvS* Belanda, dengan demikian juga *WvS* Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu, sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat.

Selanjutnya, Adami Chazawi (2008 : 67-68), menerangkan bahwa di Indonesia sendiri setidaknya dikenal ada tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar feit* (Belanda). Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* antara lain adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan terakhir adalah perbuatan pidana.

Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Adapun istilah yang dipakai Moeljatno dan Roeslan Saleh (Andi Hamzah, 2008 : 86) dalam menerjemahkan *Strafbaar feit* adalah istilah perbuatan pidana. Begitu pula dengan Ter Haar (Moeljatno, 2002 : 18) memberi definisi untuk delik yaitu tiap-tiap penggangguan keseimbangan dari satu pihak atas kepentingan penghidupan seseorang atau sekelompok orang.

Menurut Bambang Waluyo (2008 : 6) pengertian tindak pidana (delik) adalah perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (*strafbaar feiten*). R. Abdoel Djamali (2005 : 175) menambahkan bahwa peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (delik) ialah suatu perbuatan atau

rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana.

Selanjutnya menurut Pompe (P.A.F. Lamintang, 1997 : 182) perkataan "*strafbaar feit*" itu secara toeritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum".

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka penulisan menyimpulkan bahwa delik merupakan suatu perbuatan subjek hukum (manusia dan badan hukum) yang melanggar ketentuan hukum disertai dengan ancaman (sanksi) bagi perbuatannya.

2. Unsur-Unsur Delik

Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan "tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan". Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Pada

umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni;

1. Tak berhati-hati;
2. Dapat menduga perbuatan itu.

b. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

- 1) Perbuatan manusia, berupa:
 - *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;
 - *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendingkan atau membiarkan.
- 2) Akibat (*result*) perbuatan manusia.

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

- 3) Keadaan-Keadaan (*Circumstances*):

Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain:

- Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Sifat melawan hukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Semua unsur tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan pengadilan.

B. Pengertian Delik Penipuan dan Unsur-Unsurnya

1. Pengertian Delik Penipuan

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian bahasa dan menurut pengertian yuridis, yang penjelesannya adalah sebagai berikut :

a. Menurut Pengertian Bahasa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Ananda S, 2009 : 364) disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan demikian maka berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang menipu disebut

dengan penipu dan orang yang tertipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

b. Menurut Pengertian Yuridis

Pengertian Tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut Pasal 378 KUHP oleh Moeljatno (2007 : 133) sebagai berikut :

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka R. Sugandhi (1980 : 396-397) mengemukakan pengertian penipuan bahwa :

“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu

dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar”.

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya. Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

Adapun hal yang membedakan perbuatan penipuan dan perbuatan wanprestasi dapat ditinjau dari perspektif hukum

perdata. Masalah wanprestasi bisa diidentifikasi kemunculan atau terjadinya melalui beberapa parameter sebagai berikut :

1. Dilihat dari segi sumber terjadinya wanprestasi.

Wanprestasi timbul dari persetujuan (*agreement*). Artinya untuk mendalilkan suatu subjek hukum telah melakukan wanprestasi, harus ada lebih dahulu perjanjian antara dua pihak atau lebih sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 BW / KUHPerdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

“Supaya terjadi persetujuan yang sah dan mengikat, perlu dipenuhi empat syarat yaitu: adanya kesepakatan pada pihak yang mengikatkan dirinya; adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan; adanya suatu pokok persoalan tertentu yang disetujui; suatu sebab yang tidak terlarang.”

Secara umum wanprestasi biasanya terjadi karena debitur (orang yang dibebani kewajiban untuk mengerjakan sesuatu sesuai perjanjian) tidak memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati, yaitu:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali; atau
- b. Tidak tepat waktu dalam memenuhi prestasi; atau
- c. Tidak layak dalam pemenuhan prestasi sebagaimana yang dijanjikan.

2. Dilihat dari segi timbulnya hak menuntut ganti rugi.

Penuntutan ganti rugi pada wanprestasi diperlukan terlebih dahulu adanya suatu proses, seperti pernyataan lalai dari kreditor. Hal ini penting karena Pasal 1243 BW / KUHPerdata telah menggariskan bahwa;

“Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu. Kecuali jika ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang mengatakan bahwa debitur langsung dapat dianggap lalai tanpa memerlukan somasi atau peringatan.”

Ketentuan demikian juga diperkuat oleh salah satu Yurisprudensi Mahkamah Agung tertanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan;

“Apabila perjanjian secara tegas telah menentukan tentang kapan pemenuhan perjanjian maka menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu secara tertulis oleh pihak kreditur.”

3. Dilihat dari segi tuntutan ganti rugi.

Mengenai perhitungan tentang besarnya ganti rugi dalam kasus wanprestasi secara yuridis adalah dihitung sejak saat terjadi kelalaian. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1237 BW / KUHPdata yang menegaskan bahwa:

“Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu, semenjak perikatan dilahirkan, menjadi tanggungannya.”

Selanjutnya ketentuan Pasal 1246 BW / KUHPdata menyatakan;

“Biaya, ganti rugi dan bunga yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya.”

Berdasarkan Pasal 1246 BW / KUHPdata tersebut, dalam wanprestasi, penghitungan ganti rugi harus dapat diatur berdasarkan jenis dan jumlahnya secara rinci seperti kerugian

kreditur, keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian tersebut dipenuhi dan anti rugi bunga (*interest*). Dengan demikian kiranya dapat dipahami bahwa ganti rugi dalam wanprestasi (*injury damage*) yang dapat dituntut haruslah terinci dan jelas. Hal tersebut berbeda jika dibandingkan dengan masalah tuntutan ganti rugi pada kasus perbuatan melawan hukum. Dalam kasus demikian, tuntutan ganti rugi harus sesuai dengan ketentuan Pasal 1265 BW / KUHPerdara, yakni tidak perlu menyebutkan ganti rugi bagaimana bentuknya dan tidak perlu perincian. Jadi tuntutan ganti rugi didasarkan pada hitungan objektif dan konkret yang meliputi materiil dan moral. Dapat juga diperhitungkan jumlah ganti rugi berupa pemulihan kepada keadaan semula. Namun demikian, meski tuntutan ganti rugi tidak diperlukan secara terinci, beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung membatasi tuntutan besaran nilai dan jumlah ganti rugi dalam kasus akibat perbuatan melawan hukum ini, seperti terlihat pada putusan tertanggal 7 Oktober 1976 yang menyatakan :

“Besarnya jumlah ganti rugi perbuatan melawan hukum, diperpegangi prinsip Pasal 1372 KUHPerdara yakni didasarkan pada penilaian kedudukan social ekonomi kedua belah pihak.”

Demikian pula putusan Mahkamah Agung tertanggal 13 April 1978, yang menegaskan bahwa :

“Soal besarnya ganti rugi pada hakekatnya lebih merupakan soal kelayakan dan kepatutan yang tidak dapat didekati dengan suatu ukuran.”

Terkadang penipuan juga sulit dibedakan dengan penggelapan, adapun perbedaan antara penipuan dan penggelapan yaitu, tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam KUHP diatur pada Buku II tentang kejahatan terhadap harta kekayaan, yaitu berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda yang dimilikinya. Secara umum, unsur-unsur tindak pidana terhadap harta kekayaan ini adalah mencakup unsur obyektif dan subyektif.

Adapun unsur subyektif yang dimaksud adalah berupa hal-hal sebagai berikut:

1. Unsur perbuatan materiil, seperti perbuatan mengambil (dalam kasus percurian), memaksa (dalam kasus pemerasan), memiliki atau mengklaim (dalam kasus penggelapan), menggerakkan hati atau pikiran orang lain (dalam kasus penipuan) dan sebagainya;
2. Unsur benda atau barang;
3. Unsur keadaan yang menyertai terhadap obyek benda yakni harus merupakan milik orang lain;
4. Unsur upaya-upaya tertentu yang digunakan dalam melakukan perbuatan yang dilarang;
5. Unsur akibat konstitusi yang timbul setelah dilakukannya perbuatan yang dilarang.

Sedangkan unsur subyektifnya adalah terdiri atas;

1. Unsur kesalahan yang dirumuskan dengan kata-kata seperti “dengan maksud”, “dengan sengaja”, “yang diketahuinya atau patut diduga olehnya” dan sebagainya; dan
2. Unsur melawann hukum baik yang ditegaskan eksplisit atau tertulis dalam perumusan pasal maupun tidak.

Mengenai delik penipuan, KUHP mengaturnya secara luas dan terperinci dalam Buku II Bab XXV dari Pasal 378 s/d 395

KUHP. Namun ketentuan mengenai delik genus penipuan (tindak pidana pokoknya) terdapat dalam Pasal 378 KUHP. Secara yuridis delik penipuan memenuhi unsur-unsur pokok berupa:

1. Unsur subyektif delik berupa kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang – undang dengan kata – kata : “ dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”; dan
2. Unsur obyektif delik yang terdiri atas :
 - a. Unsur barang siapa;
 - b. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau member hutang atau menghapuskan piutang; dan
 - c. Unsur cara menggerakkan orang lain yakni dengan memakai nama palsu / martabat palsu / sifat palsu / tipu muslihat / rangkaian kebohongan.

Dengan demikian untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan penipuan, Majelis Hakim Pengadilan harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penipuan baik unsur subyektif maupun unsur obyektifnya. Hal ini dalam konteks pembuktian unsur subyektif misalnya, karena pengertian kesengajaan pelaku penipuan (*opzet*) secara teori adalah mencakup makna *willen en wites* (menghendaki dan mengetahui), maka harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa memang benar telah:

- a. Bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- b. Menghendaki atau setidaknya mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda atau memberi utang atau menghapuskan piutang kepadanya (pelaku delik)
- c. Mengetahui atau menyadari bahwa yang ia pergunakan untuk menggerakkan orang lain, sehingga menyerahkan suatu benda atau memberi hutang atau menghapuskan piutang kepadanya itu adalah dengan memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

Disamping itu, karena sifat atau kualifikasi tindak pidana penipuan adalah merupakan delik formil – materil, maka secara yuridis teoritis juga diperlukan pembuktian bahwa korban penipuan dalam menyerahkan suatu benda dan seterusnya kepada pelaku tersebut, haruslah benar-benar kausaliteit (berhubungan dan disebabkan oleh cara-cara pelaku penipuan) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 378 KUHP. Dan hal demikian ini tentu tidak sederhana dalam praktek pembuktian di Pengadilan. Oleh karenanya pula realitas suatu kasus wanprestasi pun seharusnya tidak bisa secara simplifistik (sederhana) ditarik dan dikualifikasikan sebagai kejahatan penipuan.

Selanjutnya mengenai tindak pidana penggelapan, KUHP telah mengaturnya dalam Buku II Bab IV yang secara keseluruhan ada dalm 6 (enam) pasal yaitu dari Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP. Namun ketentuan mengenai delik genus dari

penggelapan (tindak pidana pokoknya) terdapat pada Pasal 372

KUHP yang mengatur sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 900,-“

Berdasar Pasal 372 KUHP di atas, diketahui bahwa secara yuridis delik penggelapan harus memenuhi unsur-unsur pokok berupa :

1. Unsur Subyektif

Delik berupa kesengajaan pelaku untuk menggelapkan barang milik orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang melalui kata “dengan sengaja”

2. Unsur Obyektif

Delik yang terdiri atas :

- a. Unsur barang siapa;
- b. Unsur menguasai secara melawan hukum;
- c. Unsur suatu benda;
- d. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain; dan
- e. Unsur benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.

Jadi untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku penggelapan, Majelis Hakim Pengadilan pun harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan, apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana penggelapan (*opzet*),

melahirkan implikasi-implikasi pembuktian apakah benar (berdasar fakta hukum) terdakwa memang :

- a. "Mengehendaki" atau "bermaksud" untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum.
- b. "mengetahui / menyadari" secara pasti bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda.
- c. "Mengetahui / menyadari" bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain.
- d. "Mengetahui" bahwa benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.

Sedangkan terkait unsur-unsur onyektif delik penggelapan, menurut perspektif doktrin hukum pidana ada beberapa hal yang harus dipahami juga sebagai berikut:

1. Pelaku penggelapan harus melakukan penguasaan suatu benda yang milik orang lain tersebut melawan hukum. Unsure melawan hukum ini merupakan hal yang harus melekat ada pada perbuatan menguasai benda milik orang lain tadi, dan dengan demikian harus pula dibuktikan.
2. Cakupan mana "suatu benda" milik orang lain dikuasai oleh pelaku penggelapan secara melawan hukum tadi, dalam praktek cenderung terbatas pada pengertian benda yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan atau bisa disebut dengan istilah "benda bergerak".
3. Pengertian bahwa benda yang dikuasai oleh pelaku penggelapan, sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain, adalah mengandung arti bahwa harus ada hubungan langsung yang bersifat nyata antara pelaku dengan benda yang dikuasainya.

2. Unsur-Unsur Penipuan

Di dalam KUHP, tentang penipuan terdapat dalam Buku II Bab XXV. Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan curang. Bentuk pokok dari *bedrog* atau perbuatan curang

adalah Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka Tindak Pidana Penipuan memiliki unsur pokok, yakni :

- 1) **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.** Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.
- 2) **Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/ keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan).** Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang (R. Soenarto Soerodibroto, 1992 : 241). Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut :
 - Nama Palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat

dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.

- Tipu Muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.
- Martabat / keadaan Palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.
- Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh *Hoge Raad* dalam arrestnya 8 Maret 1926 (Soenarto Soerodibroto, 1992 : 245), bahwa :

“Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran”.

Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat / membenarkan kata orang lain.

3) Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang.

Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh *Hoge Raad* dalam arrestnya Tanggal 25 Agustus 1923 (Soenarto Soerodibroto, 1992 : 242) bahwa :

“Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.”

Adapun Unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno (2002 : 70) adalah sebagai berikut :

- 1) Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.
- 2) Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
- 3) Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :
 - a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
 - b. Sipiipu harus memperdaya sikorban dengan satu akal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak penipuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

C. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan pemidanaan

Di bawah ini merupakan pengertian pidana menurut beberapa ahli / pakar hukum diantaranya:

- Menurut Van Hamel (P.A.F. Lamintang, 1984 : 47), mengatakan bahwa:

“Arti dari pidana itu adalah straf menurut hukum positif dewasa ini, adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan yang harus ditegakkan oleh Negara.”

- Menurut Simons menurut Simons (P.A.F. Lamintang, 1984 : 48), mengatakan bahwa:

“Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim yang telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.”

- Menurut Algranjanssen (P.A.F. Lamintang, 1984 : 48):

“Pidana atau *straf* sebagai alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagaimana dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan, dan harta kekayaan, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.”

Pidana dibedakan menjadi pidana formil dan pidana materiil.

Demikian merupakan pengertian pidana formil dan pidana materiil menurut beberapa ahli / pakar hukum diantaranya:

- J.M. Van Bemmelen (Amir Ilyas, 2012 : 9) menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:

“Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.”

- Wirjono Prodjokoro (Laden Marpaung, 2005 : 2) menjelaskan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil sebagai berikut:

Isi hukum pidana adalah:

1. Penunjukan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana,
2. Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang pembuatnya dapat dihukum pidana,
3. Penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana, dan
4. Penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan.

Hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu, merupakan suatu rangkaian pengaturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.

- Tirtaamidjaja (Laden Marpaung, 2005 : 2) menjelaskan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil sebagai berikut:

“Hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana; menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum; menunjukkan orang

yang dapat dihukum dan menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau dengan kata lain, mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.”

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materiil berisi larangan atau perintah yang jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materiil.

Adapun pengertian pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

Pemidanaan adalah tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seseorang terdakwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto (M. Taufik Makarao, 2005 : 16) yang menyebutkan bahwa:

“Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berchten*) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga perdata. Kemudian istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, yaitu kerap kali disinonimkan dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.”

Meskipun *Wetboek van Strarecht* peninggalan penjajah belanda sudah tidak terpakai lagi dinegara kita ini, tapi sistem pemidanaannya

masih tetap kita gunakan sampai sekarang, meskipun dalam praktik pelaksanaannya sudah sedikit berbeda. Dalam masalah pemidanaan dikenal dua sistem atau cara yang biasa diterapkan mulai dari jaman W.V.S belanda sampai dengan sekarang yakni dalam KUHP:

- 1) Bahwa orang yang dipidana harus menjalani pidananya didalam tembok penjara. Ia harus diasingkan dari masyarakat ramai terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan dibalik tembok penjara.
- 2) Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi / resosialisasi.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

2. Jenis-Jenis Pidana

Menurut ketentuan di dalam Pasal 10 KUHP, hukum Pidana Indonesia hanya mengenal dua penggolongan pidana, yaitu:

- a. Pidana Pokok terdiri dari :
 - 1. Pidana Mati;
 - 2. Pidana Penjara;
 - 3. Kurungan;
 - 4. Denda;
- b. Pidana Tambahan terdiri dari :
 - 1. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - 2. Perampasan barang-barang tertentu
 - 3. Pengumuman Putusan Hakim

Adapun penjelasan mengenai jenis-jenis pidana tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pidana Pokok.

1. Pidana Mati

Baik berdasarkan pada Pasal 69 maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena pidana ini merupakan pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada ditanga Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.

Kelemahan pidana mati ini ialah apabila telah dijalankan, maka dapat member harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atau jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pembuatnya/petindaknya, maupun kekeliruan terhadap tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati

itu dijatuhkan dan dijalankan dan juga kekeliruan atas kesalahan terpidana.

Dalam KUHPidana, kejahatan yang diancam pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas, seperti kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan negara (Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3)jo Pasal 129), kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau dilakukan dengan faktor-faktor pemberat (Pasal 140 ayat (3), Pasal 340), kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsure/faktor yang sangat memberatkan (Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2)), kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai dan pantai (Pasal 444).

Di samping itu, sesungguhnya pembentuk KUHPidana sendiri telah memberikan suatu isyarat bahwa pidana mati harus dengan sangat hati-hati, tidak boleh gegabah. Isyarat itu adalah bahwa bagi setiap kejahatan yang diancam dengan pidana mati, selalu diancam juga dengan pidana alternatifnya, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu setinggi-tingginya 20 tahun.

Dengan disediakannya pidana alternatifnya, maka bagi hakim tidak selalu harus menjatuhkan pidana mati bagi kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati tersebut. Berdasarkan kebebasan hakim, ia bebas dalam memilih apakah akan

menjatuhkan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu, begitu juga mengenai berat ringannya apabila hakim memilih pidana penjara sementara, bergantung dari banyak faktor yang dipertimbangkan dalam peristiwa kejahatan yang terjadi secara konkret.

2. Pidana Penjara

Andi Hamzah (Amir ilyas, 2012 : 110), menegaskan bahwa:

“Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan. Pidana seumur hidup biasanya tercantum di pasal yang juga ada ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara dua puluh tahun).”

Sedangkan P.A.F. Lamintang (Amir ilyas, 2012 : 110) menyatakan bahwa:

“Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga Permasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga permasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.”

Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatas, seperti hak untuk memilih dan dipilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik, dan lain-lain.

Masih banyak hak-hak kewarganegaraan lainnya yang hilang jika seseorang berada dalam penjara sebagaimana yang dinyatakan oleh Andi Hamzah (Amir Ilyas, 2012 : 111), yaitu pidana penjara disebut pidana kehilangan kemerdekaan, bukan saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka bepergian, tetapi juga narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu seperti :

- 1) Hak untuk memilih dan dipilih (lihat Undang-undang Pemilu). Di negara liberal sekalipun demikian halnya. Alasannya ialah agar kemurnian pemilihan terjamin, bebas dari unsur-unsur immoral dan perbuatan-perbuatan yang tidak jujur;
- 2) Hak untuk memegang jabatan publik. Alasannya ialah agar publik bebas dari perlakuan manusia yang tidak baik;
- 3) Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan. Dalam hal ini telah dipraktikkan pengendalian dalam batas-batas tertentu;
- 4) Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu misalnya saja izin usaha, praktik (dokter, pengacara, notaris, dan lain-lain);
- 5) Hak untuk mengadakan asuransi hidup;
- 6) Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan. Pemenjaraan merupakan salah satu alasan untuk minta perceraian menurut hukum perdata;
- 7) Hak untuk kawin, meskipun adakalanya seseorang kawin sementara menjalani pidana penjara, namun itu merupakan keadaan luar biasa dan hanya bersifat formalitas belaka; dan
- 8) Beberapa hak sipil yang lain.

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan urutan ketiga dengan pidana penjara. Lebih tegas lagi hal ini ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) KUHP, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP, yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga, dibawah pidana mati dan pidana penjara. Memang seperti dikemukakan

dimuka, pidana kurungan diancamkan kepada delik-delik yang dipandang ringan seperti delik *culpa* dan pelanggaran.

Ninie Suparni (2007 : 23) mengemukakan :

“Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terkuhum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang.”

4. Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setara dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.

P.A.F. Lamintang (Amir Ilyas, 2012 : 114) mengemukakan bahwa:

“Pidana denda dapat dijumpai di dalam Buku I dan Buku II KUHP yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif dengan pidana penjara saja, atau alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersama-sama”.

Oleh karena itu pula pidana denda dapat dipikul oleh orang lain selama terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

b. Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidak dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus. Dengan kata lain, pidana tambahan hanyalah bersifat *accesories* yang mengikut pada pidana pokok. Ada hal-hal tertentu dimana pidana tambahan bersifat imperatif, yaitu dalam Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP.

Pidana tambahan sebenarnya tidak bersifat preventif. Ia bersifat sangat khusus sehingga sering sifat pidananya hilang dan sifat preventif inilah yang menonjol. Pidana tambahan pun termasuk dalam kemungkinan mendapat Grasi. Pidana tambahan terdiri dari:

1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah :

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- 2) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata;
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- 4) Hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawasan atas orang yang bukan anak sendiri;
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;

6) Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

Dalam hal dilakukannya pencabutan hak, Pasal 38 ayat

(1) KUHP mengatur bahwa hakim menentukan lamanya pencabutan hak sebagai berikut :

- 1) Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan adalah seumur hidup;
- 2) Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokok;
- 3) Dalam hal pidana denda, lama pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

Pencabutan hak itu mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan. Dalam hal hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

2. Perampasan Barang-Barang Tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Pidana perampasan telah dikenal sejak sekian lama. Para Kaisar Kerajaan Romawi menerapkan pidana perampasan ini sebagai politik hukum yang bermaksud mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya untuk mengisi kekayaan. Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu :

- 1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;

- 2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang;
- 3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Perampasan atas barang-barang yang tidak disita sebelum diganti menjadi pidana kurungan apabila barang-barang itu tidak diserahkan atau diharganya menurut taksiran dalam putusan hakim tidak dibayar. Kurungan pengganti ini paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.

3. Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang mengatur bahwa :

“Apabila hakim memerintahkan agar putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang”.

Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini dimaksudkan terutama untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari kelihaihan busuk atau kesembronoan seorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk pasal-pasal tindak pidana tertentu.

Didalam KUHP hanya untuk beberapa jenis kejahatan saja yang diancam dengan pidana tambahan ini yaitu terhadap kejahatan-kejahatan :

- 1) Menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Perang dalam waktu perang.
- 2) Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang-barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan sengaja atau karena alpa.
- 3) Kesembronoan seseorang sehingga mengakibatkan orang lain luka atau mati.
- 4) Penggelapan.
- 5) Penipuan.
- 6) Tindakan merugikan pemiutang.

3. Teori Tujuan Pemidanaan

Teori-teori pemidanaan yang banyak dikemukakan oleh para sarjana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai, di dalam penjatuhan pidana, yang dalam hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya yang dihayati oleh para sarjana tersebut.

Tujuan Pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro (1989 : 16) adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi.
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Para pakar hukum mengelompokkan tujuan pemidanaan menjadi tiga sasaran (P.A.F. Lamintang, 1984 : 23), yaitu :

- a. Memperbaiki pribadi penjahat;
- b. Membuat orang menjadi jera;
- c. Membuat orang tidak berdaya melakukan kejahatan.

Ada beberapa teori mengenai tujuan dijatuhkannya hukuman (tujuan pemidanaan), yaitu :

1) Teori Absolut atau teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel. Teori ini didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang untuk dijatuhkan pidana kepada pelanggar hukum. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan dengan kata lain hakikat suatu pemidanaan adalah pembalasan.

Menurut Kant (Ahmad Ferry Nindra, 2002 : 23) mengemukakan bahwa :

“Pembalasan atau suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan keadilan, hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan”.

Lebih lanjut, Stahl (Adami Chazawi, 2002 : 155) mengemukakan bahwa:

“Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia ini, karena itu negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya”.

2) Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori ini memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka disamping tujuan lainnya terdapat pula tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving der maatshappelijke orde*).

Mengenai cara mencapai tujuan itu ada beberapa paham yang merupakan aliran-aliran dari teori tujuan yaitu *prevensi khusus* dan *prevensi umum*. *Prevensi khusus* adalah bahwa pencegahan kejahatan melalui pemidanaan dengan maksud mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Pengaruhnya ada pada diri terpidana itu sendiri dengan harapan agar terpidana dapat berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Sedangkan *prevensi umum* bahwa pengaruh pidana adalah untuk mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.

Teori-teori yang dimaksudkan dalam teori *prevensi umum* adalah seperti yang ditulis oleh Lamintang (Ahmad Ferry Nindra, 2002 : 25) sebagai berikut :

- a. Teori-teori yang mampu membuat orang jera, yang bertujuan untuk membuat orang jera semua warga masyarakat agar mereka tidak melakukan kejahatan ataupun pelanggaran-pelanggaran terhadap kaedah-kaedah hukum pidana.
- b. Ajaran mengenai pemaksaan secara psikologis yang telah diperkenalkan oleh Anselm Fierbach. Menurutnya ancaman hukuman itu harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan tindak pidana, dalam arti apabila bahwa orang

melakukan kejahatan mereka pasti dikenakan sanksi pidana, maka mereka pasti akan mengurungkan niat mereka untuk melakukan kejahatan.

Adapun menurut Van Hamel (Adami Chazawi, 2002 : 162)

membuat suatu gambaran tentang pemidanaan yang bersifat pencegahan khusus, yakni :

- a. Pidana adalah senantiasa untuk pencegahan khusus, yaitu untuk menakut-nakuti orang-orang yang cukup dapat dicegah dengan cara menakut-nakutinya melalui pencegahan pidana itu agar ia tidak melakukan niatnya.
- b. Akan tetapi bila ia tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan cara menjatuhkan pidana, maka penjatuhan pidana harus bersifat memperbaiki dirinya (*reclasing*).
- c. Apabila bagi penjahat tersebut tidak dapat lagi diperbaiki, maka penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan atau membuat mereka tidak percaya.
- d. Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum didalam masyarakat.

3) Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori gabungan adalah teori kombinasi dari teori absolut dan relativ. Teori mensyaratkan bahwa pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologis dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan.

Dengan adanya keberatan-keberatan terhadap teori pembalasan dan teori tujuan, maka muncullah aliran ketiga yang mendasarkan pada jalan pikirannya bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan

menitik beratkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain maupun pada semua unsur yang ada.

Menurut Adami Chazawi (2002 : 162), teori gabungan dapat digolongkan dalam dua golongan besar, yaitu :

- Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

D. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.

Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf baginya. Selain itu hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembeda.

Apabila hal tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan dijatuhkannya nanti. Pertimbangan hakim dinilai dari

faktor hukum dan nonhukum yang kesemuanya itu haruslah disertakan dalam putusan. Faktor hukum seperti pengulangan tindak pidana (*residive*), merupakan tindak pidana berencana, dll. Sedangkan faktor nonhukum seperti sikap terdakwa dipersidangan dan alasan-alasan lain yang meringankan.

Peranan hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu saja dilakukan karena ada yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya pasti. Oleh karena itu hakim yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusan.

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) d KUHP yang berbunyi :

“Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.”

Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Hal yang sama dikemukakan oleh Lilik Mulyadi (2007 : 193-194) yang menyatakan bahwa :

“Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai mengenai aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin,

yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya.”

Dalam menjatuhkan pidana, kiranya rumusan Pasal 58 (Pasal 52) Naskah Rancangan KUHPidana (baru) hasil penyempurnaan Tim Intern Departemen Kehakiman, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut :
(Bambang Waluyo, 2008:91)

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin pembuat tindak pidana;
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- i. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; dan
- j. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Menjadi hakim merupakan tugas yang cukup berat karena dapat menentukan kehidupan seseorang untuk dapat memperoleh kebebasan ataukah hukuman. Jika terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan maka akan dapat merenggut nyawa, kemerdekaan, kehormatan dan harta benda yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan setiap insan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dengan fokus penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Kota Makassar dan khusus membahas mengenai kasus putusan No. 556/Pid.B/2012/PN/Mks. Pertimbangan mengenai dipilihnya lokasi penelitian ini yaitu dengan melakukan penelitian di lokasi ini Penulis dapat memperoleh data yang lengkap, akurat dan memadai sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang obyektif dan berkaitan dengan obyek penelitian, sesuai dengan tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap delik penipuan dalam perkara putusan No. 556/Pid.B/2012/PN.Mks serta untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku delik penipuan dalam perkara putusan No. 556/Pid.B/2012/PN.Mks.

B. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer, adalah data mengenai putusan No. 556/Pid.B/2012/PN/Mks yang diperoleh atau bersumber langsung

dari instansi yang bersangkutan yakni pada lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Makassar dan pada Pengadilan Negeri Makassar.

2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini, dilakukan dengan metode penelitian yakni :

- 1) Penelitian pustaka (*library research*). Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 2) Penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan ini ditempuh dengan cara, yaitu pertama melakukan *observasi*, yaitu mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung dengan objek penelitian. Kedua dengan cara wawancara (*interview*) langsung kepada pihak-pihak yang berkompeten baik di Kejaksaan Negeri Makassar serta pada Pengadilan Negeri Makassar yang menangani kasus tersebut.

C. Analisis Data

Penulis dalam menganalisa data yang dikumpul baik data primer maupun data sekunder akan dianalisa secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu, yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan data sekunder. Data disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materil oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku delik penipuan pada Putusan No. 556/Pid.B/2012/PN.Mks.

1. Posisi Kasus

Berdasarkan putusan No. 556/Pid.B/2012/PN/Mks tentang sebuah kasus mengenai delik penipuan. Terdakwa pada kasus ini bernama Tina alias Mama Novi, yang pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011, bertempat di Perumnas Sudiang Blok D No. 295 B Kel. Sudiang Raya Kec. Biringkanaya Kota Makassar. Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, identitas palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian perkataan bohong, menggerakkan orang lain supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, menemui saksi korban Sukri sambil mengatakan kepada saksi korban bahwa dirinya ingin diberikan pinjaman barang berupa barang-barang dagangan milik saksi korban Sukri berupa beras dan barang lainnya seperti telur ayam, minuman sari kelapa dan barang campuran

(indomie) untuk selanjutnya barang dagangan tersebut akan dijual sendiri oleh terdakwa bertempat di kios atau warung milik terdakwa.

Saksi korban Sukri meminjamkan barang dagangannya karena terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ia punya kios/warung jualan dirumahnya serta menjanjikan barang-barang tersebut akan ia bayar paling lambat sepuluh hari dari pengambilan barang yaitu tanggal 23 Oktober 2011, sehingga saksi pun mau meminjamkan barang dagangannya kepada terdakwa. Setelah terdakwa datang kerumah saksi pada hari itu, malamnya saksi pergi mengecek kerumah yang ditunjukan oleh terdakwa lalu terdakwa mengatakan bahwa itu adalah rumahnya, sehingga saksi percaya bahwa rumah yang ditunjukan kepada saksi adalah milik terdakwa.

Adapun jenis barang yang diambil oleh terdakwa yaitu, pengambilan pertama sebanyak 20 (dua puluh) karung beras 25, pengambilan kedua sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung beras 25 kg, dan pengambilan ketiga yaitu 1 (satu) karung beras 25 kg, 30 (tiga puluh) rak telur ayam, 8 (delapan) minuman sari kelapa seharga barang campuran (indomie), sehingga total jumlah harga barang yang diambil adalah sebesar Rp. 13.821.000,- (tiga belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Pada saat pengambilan barang yang kedua, terdakwa belum melunasi pembayaran barang pada pengambilan barang pertama,

karena terdakwa mengatakan bahwa ia akan membayar pengambilan barang yang pertama 10 hari kemudian. Sementara rentang waktu antara pengambilan barang yang kedua dengan pengambilan yang pertama belum sampai 10 hari, yakni 3 hari setelah pengambilan barang yang pertama. Pengambilan pertama sampai dengan pengambilan ketiga, belum ada yang pernah dibayar oleh terdakwa. Saksi tetap memberikan barang karena terdakwa janji akan membayar setelah 10 hari kemudian, namun ternyata sampai saat itu terdakwa tidak pernah membayar. Saksi telah beberapa kali mendatangi rumah terdakwa dan ia mengatakan bahwa belum mempunyai uang, dan selalu berjanji akan membayar harga barang milik saksi, namun sampai saat itu belum ia bayar harga barang tersebut. Sewaktu saksi Sukri datang kerumah terdakwa, ternyata tidak ada kios ataupun warung jualan barang-barang campuran seperti yang dikatakan oleh terdakwa ketika meminjam barang, dan adapun rumah yang terdakwa tunjukkan kepada saksi Sukri yang diakui sebagai miliknya merupakan rumah milik orang lain dan terdakwa tinggal dirumah tersebut dengan cara mengontrak. Jumlah kerugian yang saksi alami atas kejadian ini yaitu sebesar Rp. 13.821.000,- (tiga belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara No. Register Perkara : PDM-236/Mks/Ep/4/2012 adalah sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **TINA ALS. MAMA NOVI**, pada tanggal 13 Oktober 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Perumnas Sudiang Blok D No. 295 B Kel. Sudiang Raya Kec. Biringkanaya Kota Makassar atau di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, ***dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, identitas palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian perkataan bohong, menggerakkan orang lain supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, menemui saksi korban SUKRI sambil mengatakan kepada saksi korban bahwa dirinya ingin diberikan pinjaman barang berupa barang-barang dagangan milik saksi korban SUKRI untuk selanjutnya barang dagangan tersebut akan dijual sendiri oleh terdakwa bertempat di kios atau warung milik terdakwa.
- Bahwa setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut, saksi korban kemudian memberikan beberapa barang dagangan miliknya tersebut kepada terdakwa dengan harapan bahwa seluruh barang milik saksi korban tersebut akan dilunasi pembayarannya paling lambat sepuluh hari sebagaimana perkataan dari terdakwa bahwa terdakwa akan melunasi pembayaran atas seluruh barang dagangannya tersebut paling lambat sepuluh hari sejak terdakwa mengambil barang dagangan tersebut.
- Bahwa terdakwa sejatinya tidak memiliki toko ataupun kios atau setidaknya-tidaknya suatu tempat dimana terdakwa dapat menjual barang-barang dagangan yang dipinjamnya dari saksi korban tersebut, sedangkan barang-barang dagangan milik saksi korban SUKRI telah dijual oleh terdakwa kepada pihak lain dimana hasil dari penjualan barang-barang tersebut telah dinikmati sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban SUKRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.821.000,- (Tiga Belas Juta

Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, kerugian mana merupakan total nilai harga barang dagangan yang diambil oleh terdakwa dari saksi korban SUKRI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **TINA ALS. MAMA NOVI**, pada tanggal 13 Oktober 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Perumnas Sudiang Blok D No. 295 B Kel. Sudiang Raya Kec. Biringkanaya Kota Makassar atau di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar ***dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas telah menerima beberapa barang dagangan milik saksi korban SUKRI dengan total nilai barang tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp. 13.821.000,- (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).
- Bahwa barang-barang dagangan tersebut dapat berada pada terdakwa oleh karena terdakwa meminjam barang dagangan tersebut dari Saksi korban SUKRI dengan perjanjian bahwa terdakwa akan melunasi harga penjualan seluruh barang tersebut diatas setelah seluruh barang tersebut telah laku terjual oleh terdakwa.
- Bahwa setelah seluruh barang tersebut laku terjual, terdakwa justru tidak melakukan pembayaran atas nilai total harga-harga barang dagangan tersebut diatas, melainkan menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk kepentingan terdakwa sendiri.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.821.000,- (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, kerugian mana merupakan total nilai

harga barang dagangan yang diambil oleh terdakwa dari saksi korban SUKRI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara No. Register

Perkara : PDM-236/Mks/Ep/5/2012 tertanggal 10 Mei 2012, yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa TINA ALS. MAMA NOVI, bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan KESATU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TINA ALS. MAMA NOVI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) TAHUN dan 6 (enam) BULAN dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah buku tulis/catatan pengambilan barang campurang, dikembalikan kepada saksi korban SUKRI.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

2. Amar Putusan

Adapun yang menjadi amar putusan dalam perkara Nomor :

556/Pid.B/2012/PN.Mks ini adalah sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TINA ALS. MAMA NOVI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku tulis/catatan pengambilan barang campuran, dikembalikan kepada saksi Sukri;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah);

4. Analisis Penulis

Sifat melawan hukum (*wederrechtelijkeheid*) dalam ilmu hukum dikenal dua macam yaitu sifat melawan hukum materiil (*materiel wederrechtelijkeheid*) dan sifat melawan hukum formil (*formale wederechtelijkeheid*). Sifat melawan hukum materiil merupakan sifat melawan hukum yang luas yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis (dasar-dasar hukum pada umumnya). Jadi walaupun Undang-Undang tidak menyebutkannya maka melawan hukum adalah tetap merupakan unsur dari tiap tindak pidana. Sedangkan sifat melawan hukum formal adalah merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana. Sifat melawan hukum materiil terdiri dari sifat melawan hukum materiil dalam fungsi positif dan sifat melawan hukum dalam fungsi negatif. Pengertian sifat melawan hukum secara materiil dalam arti positif akan merupakan pelanggaran asas legalitas, pada Pasal 1 ayat 1

KUHP, artinya ajaran sifat melawan hukum dalam fungsi pisiitif yaitu meskipun suatu perbuatan secara materiil merupakan perbuatan melawan hukum apabila tidak ada aturan tertulis dalam perundang-undangan pidana, perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Ajaran sifat melawan hukum materiil hanya diterima dalam fungsinya yang negatif, dalam arti bahwa suatu perbuatan dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum, apabila secara materiil perbuatan itu tidak bertentangan dengan hukum.

Bagi seorang Jaksa mempertahankan dakwaannya dan menjaga agar terdakwa tidak sampai lolos dari jerat hukum adalah suatu hal yang lumrah, salah satu cara yang diusahakan untuk mempertahankannya adalah dengan membuat surat dakwaan dengan jumlah dakwaan lebih dari satu asalkan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Jaksa Penuntut Umum (Greafik Loserte, TK. S.H., wawancara tanggal 12 Desember 2012) berkaitan dengan dakwaan jaksa dalam surat tuntutan yang lebih menerapkan tindak pidana penipuan dibandingkan dengan tindak pidana penggelapan, yang dimana jaksa menyatakan bahwa :

Dalam kasus yang penulis bahas ini dipergunakan dakwaan alternatif, sebab dalam perbuatan pelaku ada beberapa pasal yang dipersangkakan dan guna menjerat pelaku agar tidak ada celah

untuk lolos dari perbuatannya. Penerapan Pasal 378 KUHP sendiri telah tepat dibandingkan dengan Pasal 372 KUHP, dimana jaksa telah mempertimbangkan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan (378 KUHP) hal tersebut bahwa pada Pasal 378 KUHP telah mencocoki semua unsur-unsur dalam ketentuan pasal tersebut dimana terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, identitas palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian perkataan bohong, menggerakkan orang lain supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang. Dengan demikian, pada kasus ini penerapan Pasal 378 KUHP telah sesuai dan terhadap teradkwa telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan.

Setelah penulis menganalisis dakwaan penuntut umum dalam kasus tersebut di atas, maka dakwaan jaksa penuntut umum telah memiliki sifat dan hakekat suatu dakwaan, yang telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap baik mengenai identitas terdakwa maupun mengenai uraian dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan disertai dengan waktu dan tanggal perbuatannya serta tempat perbuatan itu berlangsung, sehingga dengan demikian maka menurut hemat penulis dakwaan tersebut

secara formil telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 378 KUHP.

Selanjutnya penulis akan mengomentari penerapan hukum pidana materil, sebagai berikut :

Melihat penerapan hukum yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana diketahui bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Jaksa Penuntut umum membuktikan dakwaan yang paling dianggap terbukti yakni dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal maupun tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong.
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau untuk memberi hutang ataupun menghapuskan piutang.

Apabila dikaitkan dengan posisi kasus yang telah dibahas sebelumnya maka perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP, yaitu bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa dengan berdasarkan fakta yang terungkap

dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah TINA ALS. MAMA NOVI sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar sejak pada tanggal 13 Oktober 2011 bertempat di rumah saksi yaitu Perumnas Sudiang Blok D No. 295 B Kel. Sudiang Raya Kec. Biringkanaya Kota Makassar, terdakwa datang kerumah saksi dan meminjam seluruh barang dagangan milik saksi, adapun sebelum meminjam barang tersebut adalah untuk dijual oleh terdakwa bertempat di kios ataupun warung milik terdakwa, adapun hasil penjualan barang tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk melunasi barang-barang yang diambilnya dari saksi. Bahwa terdakwa ternyata tidak memiliki kios ataupun warung bertempat di rumahnya, selain itu barang-barang dagangan maupun uang hasil penjualan barang

dagangan yang diambil dari saksi Sukri dan Hasni tidak pernah diberikan ataupun dikembalikan kepada saksi tersebut diatas, adapun uang hasil penjualan barang tersebut sebagian digunakan sendiri oleh terdakwa, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 13.821.000,- (Tigas Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah). Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur “dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal maupun tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang”. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2011 bertempat di rumah saksi yaitu Perumnas Sudiang Blok D No. 295 B Kel. Sudiang Raya Kec. Biringkanaya Kota Makassar, terdakwa datang kerumah saksi untuk meminjam barang dagangan milik saksi Sukri berupa beras dan barang campuran untuk dijual di kios atau warung jualan dirumahnya dan terdakwa

menjanjikan barang-barang tersebut akan dibayar paling lambat sepuluh hari dari pengambilan barang yaitu 23 Oktober 2011, namun setelah lewat waktu 10 hari, ternyata terdakwa tidak juga membayar harga barang kepada saksi Sukri sehingga saksipun mendatangi rumah terdakwa dan terdakwa selalu berjanji akan membayar harga barang tersebut namun terdakwa tidak pernah membayar barang dagangan tersebut. Setelah saksi Sukri datang kerumah terdakwa, ternyata terdakwa tidak memiliki kios ataupun warung bertempat dirumahnya, selain itu barang-barang dagangan maupun uang hasil penjualan barang dagangan yang diambil dari saksi Sukri dan Hasni tidak pernah diberikan ataupun dikembalikan kepada saksi tersebut diatas, adapun uang hasil penjualan barang tersebut sebagian digunakan sendiri oleh terdakwa. Adapun rangkaian perkataan bohong terdakwa adalah terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa dirinya memiliki kios atau warung sebagai tempat untuk berjualan, namun setelah saksi Sukri mendatangi rumah terdakwa ternyata tidak ada kios ataupun warung tempat terdakwa dapat berjualan barang-barang tersebut, sehingga dengan adanya perkataan terdakwa tersebut, saksi korban tergerak untuk memberikan sejumlah barang kepada terdakwa. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal maupun tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sesuai Pasal 378 KUHP. Oleh karena itu kepada terdakwa adalah wajar dan patut diberi ganjaran hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP terhadap terdakwa (TINA ALS. MAMA NOVI), menurut analisis penulis, sudah tepat sebab perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 378 KUHP.

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku delik penipuan pada Putusan No. 556/Pid.B/2011/PN.Mks

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Hal – hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yakni :

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa secara tertulis tertanggal 31 Mei 2012 yang pokoknya memohon keringanan hukuman, Penuntut Umum bertetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 04 April 2012

Nomor Register Perkara : PDM-236/Mks/Ep/4/2012 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa TINA ALS. MAMA NOVI, pada tanggal 13 Oktober 2011 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Perumnas Sudiang Blok D No. 295B Kel. Sudiang Raya Kec. Biringkanaya Kota Makassar atau di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, identitas palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian perkataan bohong, menggerakkan orang lain supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada waktu itu dan tempat tersebut diatas, menemui saksi korban Sukri sambil mengatakan kepada saksi korban bahwa dirinya ingin diberikan pinjaman barang berupa barang – barang dagangan milik saksi korban Sukri untuk selanjutnya barang dagangan tersebut akan dijual sendiri oleh Terdakwa bertempat di kios atau warung milik Terdakwa.
- Bahwa setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut, saksi korban kemudian memberikan beberapa barang dagangan miliknya tersebut kepada Terdakwa dengan harapan bahwa seluruh barang dagangan milik saksi korban tersebut akan dilunasi pembayarannya paling lambat sepuluh hari sebagaimana perkataan dari Terdakwa bahwa Terdakwa akan melunasi pembayaran atas seluruh barang dagangannya tersebut paling lambat sepuluh hari sejak Terdakwa mengambil barang dagangan tersebut dari saksi korban.
- Bahwa Terdakwa sejatinya memiliki toko ataupun kios atau setidaknya-tidaknya suatu tempat dimana Terdakwa dapat menjual barang-barang dagangan milik saksi korban Sukri telah dijual oleh Terdakwa ke pihak lain dimana hasil dari penjualan barang-barang tersebut telah dinikmati sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Sukri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 13.821.000,- (tiga belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, kerugian mana merupakan total nilai harga barang dagangan yang diambil oleh Terdakwa dari saksi korban Sukri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa TINA ALS. MAMA NOVI, pada tanggal 13 Oktober 2012 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Perumnas Sudiang Blok D No. 295 B Kel. Sudiang Raya Kec. Biringkanaya Kota Makassar atau di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, telah menerima barang dagangan milik saksi korban Sukri dengan total nilai barang adalah kurang lebih sebesar Rp. 13.821.000,- (tiga belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa barang-barang dagangan tersebut dapat berada pada terdakwa oleh karena terdakwa meminjam barang dagangan tersebut dari saksi korban Sukri dengan perjanjian bahwa terdakwa akan melunasi harga penjualan seluruh barang tersebut diatas setelah seluruh barang tersebut telah laku terjual oleh terdakwa.
- Bahwa setelah seluruh barang tersebut laku terjual, terdakwa justru tidak melakukan pembayaran atas nilai total harga-harga barang dagangan tersebut di atas, melainkan menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk kepentingan terdakwa sendiri.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Sukri mengalami kerugian lebih besar Rp. 13.821.000,- (tiga belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah_ atau setidaknya sekitar jumlah itu, kerugian mana merupakan total nilai harga barang dagangan yang diambil oleh terdakwa dari saksi korban Sukri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Sukri :

- Bahwa saya memiliki usaha perdagangan yaitu menjual barang campuran dirumah saya;
- Bahwa terdakwa pernah datang ke rumah saksi;
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi di Perumnas Sudiang Blok D No. 295 B Kel. Sudiang Raya Kec.Biringkanaya Kota Makassar pada tanggal 13 Oktober 2011;
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi meminjam barang dagangan milik saksi berupa beras dan barang campuran untuk dijual di kios atau warung jualan di rumahnya;
- Bahwa saksi jadi meminjamkan barang dagangannya karena terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ia punya kios/warung jualan dirumahnya serta menjanjikan barang-barang tersebut akan ia bayar paling lambat sepuluh hari dari pengambilan barang yaitu tanggal 23 Oktober 2011, sehingga saksi pun mau meminjamkan barang dagangannya kepada terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa datang ke rumah saksi pada hari itu, malamnya saksi pergi mengecek kerumah yang diajukan oleh terdakwa lalu terdakwa mengatakan bahwa itu adalah rumahnya makanya saksi percaya bahwa rumah yang ditunjukkan kepada saksi adalah milik terdakwa;
- Bahwa jenis barang yang diambil oleh terdakwa yaitu :
 1. Pengambilan pertama sebanyak 20 karung beras 25 kg;
 2. Pengambilan kedua sebanyak 35 karung beras 25 kg;
 3. Pengambilan ketiga yaitu 1 karung beras 25 kg, 30 rak telur ayam, 8 minuman sari kelapa seharga, barang campuran (indomie);Sehingga total jumlah harga barang yang diambil adalah sebesar Rp. 13.821.000,- (tiga belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pengambilan barang yang kedua, terdakwa belum melunasi pembayaran barang pada pengambilan pertama karena kata terdakwa nanti 10 hari kemudian baru dia bayar pengambilan yang pertama, sementara rentang waktu antara pengambilan kedua dengan pengambilan yang pertama belum sampai 10 hari yakni hanya 3 hari antaranya;
- Bahwa dari pengambilan pertama sampai dengan pengambilan ketiga, belum ada yang pernah dibayar oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tetap memberikan barang karena terdakwa janji akan membayar setelah 10 hari kemudian, namun ternyata sampai sekarang terdakwa tidak pernah membayar;

- Bahwa saksi beberapa kali mendatangi rumah terdakwa dan ia mengatakan bahwa belum mempunyai uang, dan selalu berjanji akan membayar harga barang milik saksi, namun sampai sekarang belum ia bayar harga barang tersebut;
- Bahwa jumlah kerugian yang saksi alami atas kejadian ini yaitu sebesar Rp. 13.821.000,- (tiga belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu saksi datang ke rumah terdakwa, tidak ada kios atau warung jualan barang-barang campuran, itu hanya akal-akalan terdakwa saja sehingga pada waktu itu saksi meu memberikan pinjaman beras dan barang campuran;
- Bahwa dasar saksi percaya kepada terdakwa adalah rumah yang dia tunjukkan kepada saksi yang diakui sebagai miliknya, padahal ternyata rumah tersebut bukanlah miliknya melainkan milik orang lain dan terdakwa tinggal di rumah tersebut dengan cara mengontrak;
- Bahwa betul sewaktu terdakwa datang ke rumah saksi meminta barang, terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut akan dia jual di rumahnya/kiosnya;
- Bahwa betul tidak ada warung ataupun kios di rumah terdakwa;

2. Saksi Hasni :

- Bahwa saksi memiliki usaha perdagangan yaitu menjual barang campuran dirumahnya;
- Bahwa terdakwa pernah datang ke rumah saksi;
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi di Perumnas Sudiang Blok D No. 295 B Kel. Sudiang Raya Kec.Biringkanaya Kota Makassar pada tanggal 13 Oktober 2011;
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi meminjam barang dagangan milik saksi berupa beras dan barang campuran untuk dijual di kios atau warung jualan di rumahnya;
- Bahwa saksi jadi meminjamkan barang dagangannya karena terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ia punya kios/warung jualan dirumahnya serta menjanjikan barang-barang tersebut akan ia bayar paling lambat sepuluh hari dari pengambilan barang yaitu tanggal 23 Oktober 2011, sehingga saksi pun mau meminjamkan barang dagangannya kepada terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa datang ke rumah saksi pada hari itu, malamnya suami saksi (Saksi Sukri) pergi mengecek kerumah yang diajukan oleh terdakwa lalu terdakwa mengatakan bahwa itu adalah rumahnya;
- Bahwa jenis barang yang diambil oleh terdakwa yaitu :
 1. Pengambilan pertama sebanyak 20 karung beras 25 kg;
 2. Pengambilan kedua sebanyak 35 karung beras 25 kg;
 3. Pengambilan ketiga yaitu 1 karung beras 25 kg, 30 rak telur ayam, 8 minuman sari kelapa seharga, barang campuran (indomie);

Sehingga total jumlah harga barang yang diambil adalah sebesar Rp. 13.821.000,- (tiga belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa pada saat pengambilan barang yang kedua, terdakwa belum melunasi pembayaran barang pada pengambilan pertama karena kata terdakwa nanti 10 hari kemudian baru dia bayar pengambilan yang pertama, sementara rentang waktu antara pengambilan kedua dengan pengambilan yang pertama belum sampai 10 hari yakni hanya 3 hari antaranya;
- Bahwa dari pengambilan pertama sampai dengan pengambilan ketiga, belum ada yang pernah dibayar oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tetap memberikan barang karena terdakwa janji akan membayar setelah 10 hari kemudian, namun ternyata sampai sekarang terdakwa tidak pernah membayar;
- Bahwa saksi dan saksi Sukri beberapa kali mendatangi rumah terdakwa dan ia mengatakan bahwa belum mempunyai uang, dan selalu berjanji akan membayar harga barang milik saksi, namun sampai sekarang belum ia bayar harga barang tersebut;
- Bahwa jumlah kerugian yang saksi alami atas kejadian ini yaitu sebesar Rp. 13.821.000,- (tiga belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu saksi datang ke rumah terdakwa, tidak ada kios atau warung jualan barang-barang campuran, itu hanya akal-akalan terdakwa saja sehingga pada waktu itu saksi meu memberikan pinjaman beras dan barang campuran;
- Bahwa dasar saksi percaya kepada terdakwa adalah rumah yang dia tunjukkan kepada saksi yang diakui sebagai miliknya, padahal ternyata rumah tersebut bukanlah miliknya melainkan milik orang lain dan terdakwa tinggal di rumah tersebut dengan cara mengontrak;
- Bahwa betul sewaktu terdakwa datang ke rumah saksi meminta barang, terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut akan dia jual di rumahnya/kiosnya;
- Bahwa betul tidak ada warung ataupun kios di rumah terdakwa;

3. Saksi Suriani :

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu pad atanggal 13 Oktober 2011 terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa dia telah membeli secara tunai barang campuran di rumah saksi Sukri di Perumnas Sudiang Blok D No. 295 B Kel. Sudang Raya Kec. Biringkanaya Kota Makassar dan saksi disuruh oleh terdakwa untuk mengambil barang campuran tersebut;
- Bahwa barang campuran yang telah saksi ambil tersebut ia simpan di rumahnya atas permintaan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyuruh menyimpan barang-barang tersebut di rumah saksi karena rumahnya berada jauh di dalam kompleks,

sehingga ia meminta saksi menyimpan di rumahnya karena terletak di pinggir jalan agar mudah ia ambil kemudian dia distribusikan kepada pembelinya;

- Bahwa setelah beberapa hari kemudian saksi bertemu dengan saksi Sukri dan dia mengatakan bahwa terdakwa belum membayar harga barang campuran yang ia ambil waktu itu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah mengambil barang dagangan milik saksi Sukri dan saksi Hasni;
- Bahwa terdakwa kenal saksi Sukri dan saksi Hasni dari temannya;
- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah saksi Sukri dan saksi Hasni di Perumnas Sudiang Blok D No. 295 B Kel. Sudiang Raya Kec. Biringkanaya Kota Makassar untuk meminjam barang dagangan milik mereka berupa beras dan barang campuran untuk dijual di kios/warung jualan di rumahnya dan terdakwa menjanjikan barang-barang tersebut akan dibayar paling lambat sepuluh hari dari pengambilan barang yaitu tanggal 23 Oktober 2011;
- Bahwa waktu itu terdakwa membawa uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tapi tidak terdakwa gunakan untuk membayar barang dagangan mereka;
- Bahwa betul terdakwa melakukan pengambilan barang sebanyak tiga kali;
- Bahwa belum ada barang dagangan milik saksi Sukri dan saksi Hasni yang sudah terdakwa bayar sampai sekarang;
- Bahwa jumlah harga dagangan mereka yang belum terdakwa bayar yaitu sebesar Rp. 13.821.000,- (tiga belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa barang dagangan yang terdakwa ambil sudah ada yang laku terjual tetapi hasil penjualan tersebut tidak terdakwa serahkan kepada saksi Sukri dan saksi Hasni;
- Bahwa barang-barang yang sudah terdakwa ambil yaitu 56 (lima puluh enam) karung beras 25 kg, 30 (tiga puluh) rak telur ayam, 8 (delapan) minuman sari kelapa, barang campuran (indomie), sehingga jumlah harga barang yang saya ambil sebesar Rp. 13.821.000,- (tiga belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku tulis/catatan pengambilan barang campuran.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian sehingga saling mendukung satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum di persidangan yang terurai sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2011 terdakwa datang kerumah saksi Sukri dan saksi Hasni di Perumnas Sudiang Blok D No. 295 B Kel. Sudiang Raya Kec. Biringkanaya Kota Makassar untuk meminjam barang dagangan milik saksi berupa beras dan barang campuran untuk dijual di kios atau warung jualan di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi Sukri dan saksi Hasni meminjamkan barang dagangannya karena terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ia punya kios/warung jualan dirumahnya serta menjanjikan barang-barang tersebut akan ia bayar paling lambat sepuluh hari dari pengambilan barang yaitu tanggal 23 Oktober 2011;
- Bahwa jenis barang yang diambil oleh terdakwa yaitu : pengambilan pertama sebanyak 20 karung beras 25 kg, pengambilan kedua sebanyak 35 karung beras 25 kg, pengambilan ketiga yaitu 1 karung beras 25 kg, 30 rak telur ayam, 8 minuman sari kelapa seharga, barang campuran (indomie), Sehingga total jumlah harga barang yang diambil adalah sebesar Rp. 13.821.000,- (tiga belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pengambilan barang yang kedua, terdakwa belum melunasi pembayaran barang pada pengambilan pertama karena kata terdakwa nanti 10 hari kemudian baru dia bayar pengambilan yang pertama, sementara rentang waktu antara pengambilan kedua dengan pengambilan yang pertama belum sampai 10 hari yakni hanya 3 hari antaranya;
- Bahwa oleh karena terdakwa tidak pernah membayar, saksi Sukri dan saksi Hasni beberapa kali mendatangi rumah terdakwa dan ia mengatakan bahwa belum mempunyai uang, dan selalu berjanji akan membayar harga barang milik

saksi, namun sampai sekarang belum ia bayar harga barang tersebut;

- Bahwa sewaktu saksi Sukri dan saksi Hasni datang ke rumah terdakwa, ternyata tidak ada kios atau warung jualan barang-barang campuran seperti yang dikatakan oleh terdakwa ketika meminjam barang, dan adapun rumah yang terdakwa tunjukkan kepada saksi Sukri yang diakui sebagai miliknya merupakan rumah milik orang lain dan terdakwa tinggal dirumah tersebut dengan cara mengontrak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni :

- Dakwaan Kesatu : Melanggar Pasal 378 KUHP;
Atau
Dakwaan Kedua : melanggar Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua telah dipenuhi, maka Terdakwa **Tina alias Mama Novi**, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**".

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan sebagai alasan pemaaf dan pembenaran, dimana menurut pengamatan Majelis Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga menurut hukum Terdakwa dinilai cakap atau mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dipersalahkan dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikarenakan penangkapan dan penahanan tersebut berdasarkan perintah undang-undang maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa

penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanannya yang telah dijalani, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah buku tulis/catatan pengambilan barang campuran, dikembalikan kepada saksi Sukri.

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh Majelis Hakim pada diri terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan dapat meringankan terdakwa guna penerapan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi orang lain;
- Terdakwa tidak mengembalikan kerugian korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berperilaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang diputuskan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP,

Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini.

3. Analisis Penulis

Setelah memperhatikan amar putusan, terlihat bahwa hakim mengambil pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sudah sangat tepat. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti dan unsur-unsur delik yang didakwakan, dan pertimbangan nonyuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Bapak Jan Manoppo, S.H, M.H., yang menerangkan bahwa putusan tersebut dijatuhkan berdasarkan atas tuntutan penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian hal tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan. Pada perkara ini terdakwa dijerat Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Setelah itu Majelis Hakim menimbang apakah ada alasan yang dapat

menjadi dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Namun, pada perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa. Oleh karena itu terdakwa dinyatakan harus dapat memepertanggungjawabkan perbuatannya. Pada perkara ini putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal ini disebabkan karena adanya hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan. Lebih lanjut menurut Jan Manoppo, S.H, M.H., adapun hal-hal yang meringankan terdakwa pada perkara antara lain adalah :

- a) Terdakwa berperilaku sopan di persidangan.
- b) Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan disertai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta tuntutan pidana penuntut umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pembedaan, maka Majelis Hakim melakukan musyawarah dan berpendapat bahwa pidana yang diputuskan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan lalu kemudian menjatuhkan putusan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penulis diatas, maka penulis dapat berkesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan hukum pidana materiil oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara putusan No. 556/Pid.B/2012/PN/Mks, terdakwa didakwakan dengan menggunakan dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 378 KUHP dan atau Kedua Pasal 372 KUHP, dan surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan materiil surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 143 ayat (2) KUHP. Dalam tuntutananya, Penuntut Umum menuntut terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP, berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa, maka penerapan ketentuan pidana pada perkara ini yakni Pasal 378 KUHP telah sesuai dan tepat.
2. Pertimbangan hukum Hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara dalam perkara putusan No. 556/Pid.B/2012/PN/Mks, oleh Majelis Hakim terdakwa dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan pada Pasal 378

KUHP, berbeda dengan tuntutan Penuntut Umum yakni 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan pidana penjara karena bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Pertimbangan Hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara ini telah sesuai dimana hakim telah mempertimbangkan baik dari pertimbangan yuridis, fakta-fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang ada, keyakinan Hakim serta hal-hal yang mendukung serta sanksi pidana yang dijatuhkan masih sangat ringan, tidak cukup untuk menimbulkan efek jera yang memberikan rasa takut bagi terpidana pada khususnya, dan khalayak ramai pada umumnya, sebagaimana fungsi pidana pada mestinya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah :

1. Penerapan sanksi pidana harus dilakukan lebih optimal, terpadu dan terarah yang tidak hanya berupa penegakan dalam landasan teori yang pembuatan sejumlah peraturan perundang-undangan, melainkan dalam praktek sebagai salah satu upaya nyata keseriusan oleh para aparat penegak hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana penipuan.

2. Selain pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku kejahatan khususnya penipuan maka diharapkan pula Majelis Hakim dalam memutus perkaranya memperhatikan pula segi non yuridis dari perbuatan pelaku yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa karena hal tersebut berpengaruh pada sisi psikologis terdakwa pada khususnya.
3. Penulis mengharapkan kepada segenap aparat penegak hukum agar setiap pelaku kejahatan sekiranya ditindak dengan tegas dan dijatuhi sanksi yang mampu membuat para pelaku kejahatan jera.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

_____, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Bagian 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ahmad Ferry Nindra, 2002, *Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psikotropika di Kota Makassar*, Perpustakaan Unhas, Makassar.

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkang, Yogyakarta.

Ananda S, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya.

Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ilham Gunawan, 2002, *Kamus Hukum*, Cv. Restu Agung, Jakarta.

Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 2007, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Taufik Makarao, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Ninie Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dalam Sistem Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Abdoel Djamali, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- R. Soenarto Soerodibroto, 1992, *KUHP & KUHPA*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2006, *KUHP dan KUHPA di Lengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

R. Sugandhi, 1980, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.

Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung.

LAMPIRAN